

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Pencatatan keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan [transaksi](#) untuk suatu [perusahaan](#) atau [organisasi](#) dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi [manajer](#) atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban [keuangan](#) terhadap para pemegang [saham](#). Hal penting dari pencatatan keuangan adalah adanya [Standar Akuntansi Keuangan](#) (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian [laporan keuangan](#) untuk kepentingan [eksternal](#). Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat [berkomunikasi](#) melalui laporan keuangan ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tak lagi bertumpu atau mengandalkan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) saja, tapi dalam Permendagri itu juga disebutkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya yang kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laporan keuangan (DPKAD).

Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (pasal 15 dan 16) dijelaskan bahwa

APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;
- Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Laporan Keuangan adalah gambaran tentang neraca/laporan posisi keuangan laporan rugi laba dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Laporan keuangan ini diperlukan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan

biasa dibuat oleh perusahaan pada akhir periode atau pada akhir tahun buku. Laporan keuangan dapat dibuat secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Namun untuk kepentingan pihak eksternal laporan keuangan dibuat secara tahunan. Laporan keuangan tahunan meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sesuai PP nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan terdiri dari:

1. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan Pos Laporan Keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yg dihadapi dalam pencapaian target. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

- a) Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. misal: Penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.
 - b) Penjelasan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan. Entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPR/DPRD, atau entitas pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. misal: Jumlah unit pembangunan sekolah dasar terhambat karena keterbatasan lahan, dana, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Kebutuhan penggunaan laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja, namun pengguna laporan keuangan pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Pembahasan mengenai Kinerja Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus:
- a) Menguraikan strategi dan sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan
 - b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam suatu entitas pelaporan

- c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk memberi keyakinan yang beralasan bahwa info kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal.
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting. Sedangkan kebijakan akuntansi itu sendiri harus memiliki pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Karena Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan relitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
- a) Pertimbangan sehat
 - b) Substansi menguji bentuk formal
 - c) Materilitas.
- Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yg disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.
- 4) Mengungkapkan Informasi yang diharuskan oleh SAP yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. Di latar belakang oleh keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan. Untuk itu pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode mendatang.
- 5) Mengungkapkan info untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dgn penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan

rekonsiliasinya dgn penerapan basis kas. Tujuannya dari pengungkapan pos asset dan kewajiban agar pembaca laporan dapat memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul dikarenakan penerapan basis akrual pada pos pendapatan dan belanja. Sedangkan tujuan rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual.

- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting tahun pelaporan, seperti:

- (1)Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan,
- (2)Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru
- (3)Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca
- (4)Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan
- (5)Kejadian yang mempunyai dampak sosial

2. Laporan realisasi anggaran (LRA)

Merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,

akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut:

- (1) kas dan setara kas;
- (2) investasi jangka pendek;
- (3) piutang pajak dan bukan pajak;
- (4) persediaan;
- (5) investasi jangka panjang;
- (6) aset tetap;
- (7) kewajiban jangka pendek;
- (8) kewajiban jangka panjang; dan
- (9) ekuitas.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari :

- a) Aset secara umum diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan kedalam aset lancar jika diharapkan untuk segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan kedalam aset nonlancar. Secara rinci aset di Pemerintahan daerah dibedakan atas:

1. Aset lancar; meliputi kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
 2. Aset tetap; meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
 3. Aset lainnya; meliputi aset tak berwujud.
- b) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan kedalam:
- (1) Kewajiban jangka pendek, yaitu kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Universitas Sumatera Utara 21
 - (2) Kewajiban jangka panjang yaitu kelompok kewajiban yang penyelesaiannya selesai setelah dua belas bulan terhitung setehan tanggal pelaporan.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat dikelompokkan menjadi:
- Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka panjang.
 - Ekuitas dana investasi adalah kekayaan pemerintahan yang tertahan dalam aset nonlancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
 - Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintahan yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai

peraturan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Laporan perubahan ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- ✓ Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
- ✓ Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

2.1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut di sampaikan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

2) Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

3) Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.1.1.3 SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

SAP singkatan dari Standar Akuntansi Pemerintah. SAP ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

SAP diterapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Penyusunan SAP melalui tahapan-tahapan seperti:

- ✓ Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
- ✓ Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
- ✓ Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
- ✓ Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
- ✓ Pembahasan Draft oleh Komite Kerja
- ✓ Pengambilan Keputusan Draft untuk Dipublikasikan
- ✓ Peluncuran Draft Publikasian SAP (Exposure Draft)

- ✓ Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings)
- ✓ Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draft Publikasian
- ✓ Finalisasi Standar

Jadi SAP disusun hanya untuk instalasi pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Dan diharapkan dengan adanya SAP maka akan ada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

2.1.1.4 Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan keuangan berarti: “menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.” (Harahap, 1998). Analisis keuangan dapat diartikan sebagai usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan diperlukan ukuran tertentu.

2.1.1.5 Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005).

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005).

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Adanya pertanggungjawaban terbuka
2. Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan
3. Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Dalam ranah keuangan publik, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Namun, hingga saat ini belum ada kriteria normatif mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Bahkan dalam PSAP pun belum disebutkan kriteria laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kriteria laporan yang relevan dan andal. Dalam PSAK no 1, laporan keuangan disebut relevan jika berguna bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan laporan keuangan disebut andal jika dapat memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan.
2. Menggambarkan substansi ekonomi dari sesuatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya.
3. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan.
4. Mencerminkan kehati-hatian.
5. Mencakup semua hal yang material

2.1.1.6 Mekanisme Analisis dan Pengambilan Keputusan

Dalam melakukan analisis laporan keuangan, pengguna informasi harus mengumpulkan informasi yang terkait dengan laporan keuangan dimaksud sebanyak mungkin. Semakin lengkap informasi yang didapatkan, semakin optimal hasil yang dicapai dan akan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan.

Sedangkan data yang digunakan dalam analisis laporan keuangan antara lain meliputi:

- a. *Raw Financial Data* adalah data yang tersaji dalam bentuk asli. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari laporan keuangan suatu entitas.

b. *Common Size Data* adalah data yang tersaji dalam bentuk persentase. Persentase ini bisa dikaitkan dengan suatu jumlah yang dinilai penting, misalnya untuk neraca dan laporan realisasi anggaran.

c. *Ratio Data* adalah data yang tersaji dalam bentuk rasio yang berasal dari data sekunder dari pihak lain atau data yang kita olah atau analisis dari laporan keuangan yang ada.

Namun demikian, analisis laporan keuangan tidak hanya membutuhkan data historis/informasi masa lalu, melainkan juga informasi mengenai apa yang akan terjadi di waktu mendatang.

2.1.1.7 Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali.

Kesalahan ini dikelompokkan dalam dua jenis:

- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- b. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan

akan terjadi berulang. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

2.1.1.8 Metode Pengakuan Pendapatan

Terdapat dua metode dalam pengakuan pendapatan yaitu:

1. Metode Basis Kas (*cash basic*)

Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain akuntansi cash basic adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Cash basic akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika kas diterima maka transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya dengan “dasar akrual” hal ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan. Jika menggunakan dasar akrual maka penjualan produk perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang sehingga berpengaruh pada besarnya piutang dagang, sebaliknya jika menggunakan

dasar kas maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari sebenarnya yang terjadi.

Keunggulan pencatatan akuntansi secara *Cash Basic* adalah:

- a. Metode *cash basic* digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. Beban/ biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam perhitungan pendapatan.
- c. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya.
- d. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.
- e. Laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
- f. Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.

Sedangkan kelemahan dari metode basis kas adalah:

- a. Metode ini tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
- b. Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya kas.
- c. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
- d. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang relatif kecil seperti toko, warung, dll.
- e. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.

- f. Sulit melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatannya diakui pada saat kas masuk atau keluar.
- g. Sulit bagi manajemen untuk melakukan suatu kebijakan kedepannya, karena selalu berpatokkan pada kas.

2. Metode Akrual (*accrual basic*)

Pengakuan pendapatan dengan pendekatan akrual termasuk yang paling mendasar, sehingga paling banyak diterapkan diberbagai jenis bidang usaha dalam berbagai skala. Pada dasarnya basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa tersebut terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam metode ini, pendapatan dicatat atau diakui pada saat pendapatan dihasilkan tanpa memperhatikan kapan pendapatan tersebut diterima. Keunggulan dari metode ini antara lain:

- a. Metode akrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- b. Beban diakui pada saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
- c. Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi, sehingga informasi yang diberika lebih handal dan terpercaya merkipun kas belum diterima.
- d. Banyak digunakan oleh perusahaa-perusahaan besar karena sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- e. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung ke dalam estimasi piutang tak tertagih.

- f. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
- g. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
- h. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pihak manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang.
- i. Adanya pembentukan cadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian.

Sedangkan kelemahan dari metode basis akrual adalah:

- a. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
- b. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
- c. Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
- d. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan yang belum dibayarkan oleh pihak lain akan diterima.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Rumusan	Hasil Penelitian

	(Asal/Tahun)	Penelitian	Masalah	
1.	Endah Noviana, Universitas Sumatra Utara (2010)	Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan Kerja perangkat daerah (skpd) di pemerinta h kota medan(Stu di kasus pada dinas tata kota tata bangunan)	menganalisis kesesuaian pencatatan dan pelaporankeu angan pada SKPD di Kota Medan khususnya Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005.	Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan telah melakukan proses pencatatan akuntansinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005
2.	Anastasia	Analisis	menganalisis	Dinas Kependudukan

<p>Patrisia Thilda Tampanatu Universitas Sam Ratulangi Manado</p>	<p>Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Langsung Pada SKPD di Kota Bitung</p>	<p>pencatatan dan pelaporan belanja langsung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambar kan data yang diperoleh berupa catatan dan laporan</p>	<p>dan Pencatatan Sipil Kota Bitung telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Laporan Bulanan Bendahara Pengeluarankhususnya tahun anggaran 2011 dimana format dan uraian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian</p>
---	---	--	--

			belanja	menunjukkan adanya ketaatan pada aturan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung.
3.	Ria Valentina Pajouw, Universitas Sam Ratulangi Manado	Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada unit pelaksana Teknis dinas di pemerintah provinsi Sulawesi utara	Untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan keuangan pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010	bahwa UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan proses pencatatan akuntansi, serta pelaporannya telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Pada tahun anggaran berikutnya, sebaiknya pimpinan UPTD Metrologi terus mempertahankan penyajian laporan keuangan sesuai amanat PP yang berlaku dengan transparan dan tepat waktu sehingga dapat

			atau belum?	dipergunakan bagi pengguna laporan guna pengambilan keputusan
4.	Dewi Anggraini, STIE”KBP” Padang	Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan kerja perangkat daerah (skpd) di kota pariaman (studi kasus pada dinas koperasi, Perindustrian dan	untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada Instansi Pemerintahan, apakah sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan	pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, Peraturan Walikota Pariaman No.212 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama kali atas Peraturan Walikota Pariaman No.41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

		perdagangan)	Keuangan Daerah dan PP. No 24 Tahun 2005 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) sebagai acuan serta kendala apa yang dihadapi dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan tersebut	Kota Pariaman, Peraturan Daerah Kota Pariaman No.6 Tahun 2008 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai acuan
5.	Ahmad Syaiful Ma'arif, Universitas	Analisis penerapan SIPKD	menganalisis kesesuaian pencatatan	penelitian menunjukkan bahwa Dinas PU Bina Marga dalam Pencatatan

	Trunojoyo Madura	dalam pencatatan dan pelaporan pada SKPD Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang	dan pelaporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Sampang khususnya Dinas PU Bina Marga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	dan Penyusunan Laporan Keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, namun Laporan Keuangan telah disajikan tepat waktu sehingga bias dipergunakan bagi kelompok pengguna Laporan Keuangan guna pengambilan keputusan.
--	---------------------	--	--	---

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berabagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik menjelaskan akan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis akan dijelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2009:88) “kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun

suatu kerangka berpikir yang membuahakan kesimpulan”. Kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.2 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah merupakan langkah ke 3 dalam penelitian, setelah peneliti mengungkapkan landasan teori dan kerangka berfikir. Tetapi perlu diketahui bahwa setiap penelitian tidak harus merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh

melalui empiris data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris.

